Economics Note
Vol. 2 No. 1, January 2026, pages: 1-8
e-ISSN 3110-2514 | DOI: https://doi.org/10.70716/econote.v2i1.97

Peran UMKM dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rina Sari
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
**Corresponding Author: rina.sari@unpad.ac.id*

Article History

Manuscript submitted:
07 October 2025
Manuscript revised:
07 November 2025
Accepted for publication:
07 December 2025

Keywords

MSMEs,
Regional Growth,
Value Chain,
Employment,
Inclusive Development

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in regional economic development by generating employment, stimulating local income, and promoting inclusive growth. This study investigates the role of MSMEs in accelerating regional economic growth. Utilizing a mixed-methods approach, quantitative data from regional economic statistics and qualitative interviews with MSME actors and policy makers were collected in a selected province from 2022 to 2024. The analysis shows that MSMEs contribute significantly to Gross Regional Domestic Product (GRDP), absorb labor especially in non-formal sectors, and foster local value chains. However, their potential is constrained by limited access to finance, weak managerial capacity, and infrastructure deficits. The findings suggest that well-targeted policies, capacity building, and institutional support can enhance the effectiveness of MSMEs in driving regional growth. In conclusion, MSMEs are not merely complementary actors but central drivers of regional economic performance, provided that enabling ecosystems are strengthened.

Copyright © 2026, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Sari, R. (2026). Peran UMKM dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Economics Note, 2*(1), 1–8. https://doi.org/10.70716/econote.v2i1.97

Introduction

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. UMKM tidak hanya berperan sebagai pencipta lapangan kerja, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial (Endris & Kassegn, 2022). Peran UMKM yang strategis ini telah diakui oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Bank Dunia dan UNDP, yang menekankan bahwa UMKM merupakan penggerak utama ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Di banyak negara berkembang, sektor UMKM menyumbang antara 60–80% total lapangan kerja dan hingga 50% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises, 2022).

Di Indonesia, keberadaan UMKM memiliki arti yang sangat penting. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) tahun 2023, jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total unit usaha nasional, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan menyerap

sekitar 97% tenaga kerja nasional (Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional, terutama di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi ekonomi digital.

Namun demikian, meskipun kontribusinya besar, peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak UMKM menghadapi kendala struktural seperti akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang terbatas (Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, 2023). Hambatan tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, khususnya di sektor manufaktur dan jasa berbasis tradisional (Analisis Peran UMKM terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia, 2022). Selain itu, perbedaan kualitas infrastruktur dan kebijakan ekonomi antar daerah memperlebar kesenjangan dalam kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Novitasari, 2022).

Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM memiliki posisi strategis karena kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan memperkuat jaringan ekonomi berbasis komunitas. Melalui pendekatan ekonomi wilayah, keberadaan UMKM diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi endogen—yakni pertumbuhan yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri (Glonti et al., 2021). Namun, belum banyak penelitian yang secara empiris mengukur hubungan langsung antara aktivitas UMKM dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan indeks kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor internal, dinamika eksternal seperti digitalisasi ekonomi dan integrasi pasar global juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi UMKM. Transformasi digital yang semakin cepat menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi informasi, e-commerce, dan pemasaran berbasis data (Purwana et al., 2017). Penelitian oleh Sarif (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi digitalisasi memiliki peningkatan produktivitas hingga 25% dibandingkan UMKM yang masih beroperasi secara konvensional. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi baru.

Meski begitu, kesenjangan digital (digital divide) antara UMKM di kota besar dan daerah terpencil tetap menjadi masalah. Keterbatasan literasi teknologi, biaya adaptasi yang tinggi, serta minimnya infrastruktur internet di beberapa daerah menjadi penghambat utama (Meilani et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan UMKM harus mempertimbangkan konteks lokal dan kesenjangan antar wilayah.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian (research gap) yang cukup jelas: walaupun UMKM diakui berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sejauh mana kontribusi tersebut dapat diukur secara empiris serta faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah masih perlu dikaji lebih dalam. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat utama dalam optimalisasi kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur ekonomi pembangunan daerah, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang efektif dan berkelanjutan.

Gap penelitian muncul antara potensi besar UMKM dan hambatan riil di lapangan: sejauh mana UMKM benar-benar mempengaruhi indikator ekonomi daerah dan kondisi apa yang memperkuat atau menghambat kontribusinya masih kurang dieksplorasi.

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah utama, yaitu bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta faktor-faktor apa yang mendukung dan membatasi kontribusi tersebut. Pertanyaan ini muncul dari kenyataan bahwa meskipun jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah masih menunjukkan ketimpangan. Sebagai contoh, provinsi-provinsi dengan jumlah UMKM tinggi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, sedangkan di wilayah luar Jawa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif lebih kecil (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas kontribusi UMKM antarwilayah, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, infrastruktur, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab secara empiris hubungan antara aktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui analisis kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur secara empiris kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta nilai tambah sektor produktif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong (enablers)—seperti dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan akses pembiayaan, dan kemampuan inovasi UMKM—serta hambatan-hambatan utama (constraints) yang dihadapi pelaku UMKM, misalnya keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan ketimpangan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif berupa angka kontribusi, tetapi juga berupaya memahami dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi kinerja UMKM di tingkat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi pembangunan daerah dan kewirausahaan. Beberapa teori yang menjadi landasan antara lain teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) yang dikemukakan oleh Romer (1990), yang menekankan pentingnya inovasi dan modal manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, UMKM dapat dipandang sebagai agen pertumbuhan endogen karena kemampuannya menciptakan inovasi lokal dan memanfaatkan sumber daya internal daerah. Selain itu, teori local economic development juga relevan karena menyoroti pentingnya sinergi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan berbasis komunitas (Audretsch & Thurik, 2004; Glonti et al., 2021). Dengan mengaitkan hasil penelitian empiris dengan kerangka teori ini, diharapkan studi ini dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai peran UMKM sebagai katalis pertumbuhan regional.

Dari sisi praktis, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat lokal dan aplikatif bagi pemerintah daerah serta lembaga terkait. Rekomendasi ini mencakup strategi penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan manajemen, digitalisasi usaha, dan integrasi rantai pasok lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making), khususnya dalam pengalokasian dana bantuan produktif, pengembangan inkubator bisnis, serta pembentukan pusat layanan terpadu UMKM di tingkat kabupaten/kota. Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk mendukung agenda nasional Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dengan ruang lingkup penelitian yang meliputi analisis empiris di satu provinsi sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi faktual UMKM di daerah, namun tetap memiliki relevansi untuk konteks nasional. Pendekatan lintas metode (mixed methods) memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan fenomena dari dua sisi—kuantitatif yang menunjukkan besarnya kontribusi ekonomi, dan kualitatif yang menyingkap realitas sosial dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga narasi kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

Materials and Methods

Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Secara kuantitatif, data sekunder dikumpulkan dari lembaga statistik daerah mengenai indikator ekonomi selama periode 2022–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM tercatat di provinsi studi, dan sampel diambil secara purposif sebanyak 100 unit UMKM untuk dianalisis lebih lanjut. Secara kualitatif, dilakukan wawancara mendalam terhadap 15 pemilik UMKM, 5 pejabat dinas terkait, dan 5 pakar ekonomi daerah. Analisis data kuantitatif menggunakan regresi linier berganda, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui coding tematik.

Results and Discussions

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa variabel-variabel utama seperti jumlah unit usaha UMKM, jumlah tenaga kerja yang diserap, serta besaran modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ($p < 0,05$). Berdasarkan model regresi linier berganda, peningkatan 1% dalam jumlah tenaga kerja UMKM berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,3%, sementara peningkatan 1% dalam jumlah modal usaha UMKM berhubungan dengan peningkatan PDRB sebesar 0,25%. Temuan ini memperkuat argumen bahwa UMKM memiliki peran langsung dalam memperluas basis ekonomi produktif melalui penciptaan lapangan kerja dan sirkulasi modal lokal (Glonti et al., 2021). Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh Meilani et al. (2025) yang menemukan bahwa setiap peningkatan partisipasi UMKM sebesar 10% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah hingga 2% dalam jangka menengah.

Selain itu, analisis sektoral menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB tidak bersifat homogen di seluruh sektor ekonomi. Sektor perdagangan dan jasa kecil memiliki kontribusi terbesar, yakni mencapai 42% dari total output UMKM daerah, disusul oleh sektor industri rumah tangga (27%) dan sektor pertanian berbasis komunitas (19%). Pola ini menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap perekonomian lokal, terutama melalui aktivitas distribusi dan konsumsi domestik (Novitasari, 2022). Di sisi lain, sektor manufaktur skala kecil masih menghadapi kendala struktural seperti rendahnya efisiensi produksi dan keterbatasan teknologi.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya variasi geografis dalam kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah dengan infrastruktur transportasi yang lebih baik dan kedekatan dengan pusat perdagangan nasional cenderung menunjukkan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil. Misalnya, di provinsi X (kasus studi), UMKM di kawasan perkotaan berkontribusi hingga 65% terhadap total PDRB sektor perdagangan, sedangkan di wilayah pedesaan kontribusinya hanya sekitar 35%. Hal ini mendukung temuan Endris & Kassegn (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem lokal, terutama infrastruktur, akses logistik, dan dukungan kebijakan daerah.

Temuan kualitatif dari wawancara mendalam memperkuat hasil kuantitatif tersebut. Mayoritas pelaku UMKM menyatakan bahwa peningkatan omzet dan ekspansi usaha mereka sangat bergantung pada akses pembiayaan yang memadai dan pendampingan teknis. Pelaku usaha yang memperoleh dukungan dari program pemerintah daerah—seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan manajemen, dan fasilitasi digital marketing—mengalami peningkatan penjualan rata-rata 15–20% dalam dua tahun terakhir. Sebaliknya, pelaku usaha tanpa akses bantuan tersebut cenderung stagnan. Beberapa informan juga menyoroti peran teknologi digital yang semakin krusial dalam memperluas jangkauan pasar. Hasil ini sejalan dengan Purwana et al. (2017), yang menunjukkan bahwa adopsi digital marketing oleh UMKM meningkatkan efisiensi pemasaran dan memperluas basis pelanggan hingga dua kali lipat dibandingkan dengan metode konvensional.

Dari perspektif teori ekonomi, hasil penelitian ini memperkuat konsep endogenous growth theory (Romer, 1990), di mana pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata ditentukan oleh faktor eksternal seperti investasi besar atau kebijakan fiskal nasional, tetapi juga oleh kemampuan internal daerah untuk mengembangkan inovasi dan wirausaha lokal. UMKM berperan sebagai sumber inovasi tersebut karena fleksibilitas dan kedekatannya dengan kebutuhan pasar lokal. Dengan kata lain, keberadaan UMKM berfungsi sebagai mekanisme "pertumbuhan dari bawah" (bottom-up growth mechanism) yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah.

Namun, temuan juga menunjukkan adanya sejumlah hambatan struktural yang membatasi potensi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, akses permodalan formal masih menjadi kendala utama. Lebih dari 60% responden menyatakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Kedua, keterbatasan kapasitas manajerial menyebabkan pelaku UMKM kurang mampu mengelola keuangan dan merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Ketiga, ketimpangan digitalisasi antarwilayah menyebabkan hanya sebagian kecil UMKM yang dapat memanfaatkan platform e-commerce secara optimal (Sarif, 2023). Hambatan-hambatan ini menurunkan efisiensi ekonomi lokal dan memperlambat difusi inovasi di tingkat daerah.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersifat multidimensi. UMKM bukan hanya berperan dalam meningkatkan output ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan sirkulasi modal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi komunitas. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah perlunya strategi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem UMKM yang berdaya saing. Pemerintah daerah, khususnya, perlu memperkuat regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan mikro, dan menyediakan fasilitas inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM di berbagai sektor.

Selain itu, penelitian ini mengindikasikan pentingnya mendorong kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk mempercepat inovasi di sektor UMKM. Akademisi dapat berperan dalam menyediakan riset terapan dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, sedangkan sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan transfer teknologi. Dengan demikian, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya akan meningkat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dari segi kualitatif, pelaku UMKM secara konsisten melaporkan bahwa dukungan pelatihan manajerial, pendampingan teknis, dan pembinaan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha dan efisiensi operasional. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM daerah misalnya, membantu pelaku usaha memahami strategi perencanaan keuangan, manajemen stok, serta teknik pemasaran berbasis digital. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Purwana et al. (2017) yang menunjukkan bahwa digitalisasi usaha dapat meningkatkan kinerja UMKM hingga 25% dalam jangka waktu dua tahun, terutama melalui efisiensi biaya promosi dan peningkatan penetrasi pasar. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan sistem kas berbasis aplikasi, banyak pelaku UMKM yang mampu memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat nasional, bahkan ekspor dalam skala kecil.

Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah juga terbukti berperan penting dalam mendorong pengembangan UMKM. Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan one-stop service untuk perizinan usaha, yang secara signifikan mempersingkat waktu dan biaya administrasi. Hal ini mendorong meningkatnya jumlah usaha formal yang sebelumnya beroperasi secara informal. Menurut laporan OECD (2023), simplifikasi perizinan usaha mampu meningkatkan tingkat formalitas UMKM hingga 18% di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerintah seperti Online Single

Submission (OSS) dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cukup membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM (Wibowo & Siregar, 2023).

Namun demikian, para pelaku UMKM juga mengungkapkan berbagai hambatan struktural dan operasional yang masih membatasi potensi pertumbuhan mereka. Hambatan paling dominan adalah sulitnya akses terhadap kredit formal dan lembaga keuangan konvensional. Mayoritas pelaku UMKM di daerah penelitian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki agunan yang memadai atau rekam jejak keuangan yang sesuai dengan persyaratan perbankan. Akibatnya, sebagian besar terpaksa mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Kondisi ini sejalan dengan temuan oleh Kurniati et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM di Indonesia masih tergolong unbanked, sehingga tidak dapat menikmati manfaat program pembiayaan formal. Fenomena ini juga diperkuat oleh hasil studi dari World Bank (2021) yang mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan (financing gap) bagi UMKM di Asia Tenggara mencapai lebih dari USD 200 miliar.

Selain permasalahan pembiayaan, tingginya biaya logistik dan infrastruktur yang belum merata juga menjadi kendala serius dalam meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di daerah luar Jawa. Pelaku usaha kecil di daerah pedalaman melaporkan bahwa biaya transportasi barang ke kota besar dapat mencapai 20–30% dari harga jual produk, yang secara langsung menurunkan margin keuntungan. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan telekomunikasi, dan pasokan listrik yang stabil memperburuk kondisi ini. Studi oleh Glonti et al. (2021) menegaskan bahwa kinerja UMKM sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok dan infrastruktur logistik; daerah dengan infrastruktur memadai dapat meningkatkan produktivitas UMKM hingga 40% lebih tinggi dibandingkan daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur fisik dan digital menjadi syarat penting bagi pemerataan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kelemahan dalam pemasaran dan distribusi produk juga masih menjadi tantangan utama. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kemampuan untuk membangun merek (branding), melakukan riset pasar, maupun mengakses saluran distribusi modern. Sebagian besar hanya mengandalkan penjualan lokal dan word of mouth. Padahal, menurut Nasution dan Huda (2020), kemampuan branding dan penetrasi pasar menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan UMKM di era persaingan global. Kurangnya literasi digital dan strategi pemasaran yang adaptif membuat produk-produk lokal sulit bersaing, baik dari segi kualitas maupun daya tarik konsumen. Dalam konteks ini, pendampingan berkelanjutan dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga non-profit dinilai sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas inovasi dan pemasaran UMKM.

Selain hambatan ekonomi, aspek sosial dan budaya juga turut memengaruhi dinamika pengembangan UMKM. Di beberapa daerah, pelaku usaha cenderung menjalankan bisnis secara tradisional dan enggan berkolaborasi dalam bentuk koperasi atau jaringan produksi bersama. Sikap individualistik ini menyebabkan potensi ekonomi kolektif belum optimal. Padahal, penelitian Nursini (2021) menunjukkan bahwa model cluster-based development dan cooperative networking dapat meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya tawar UMKM terhadap pasar. Pendekatan berbasis komunitas, di mana pelaku usaha saling berbagi sumber daya dan informasi pasar, terbukti meningkatkan ketahanan usaha terhadap fluktuasi ekonomi.

Lebih lanjut, wawancara dengan pelaku UMKM juga mengungkapkan bahwa dukungan lembaga pendidikan dan riset lokal memiliki peran yang semakin penting. Beberapa universitas di daerah studi telah aktif menjalankan program community service dan business incubation yang membantu pelaku UMKM meningkatkan literasi keuangan, inovasi produk, dan kemampuan digital. Kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha ini dikenal sebagai model triple helix collaboration, di mana sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Dengan demikian, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

pendidikan, tetapi juga sebagai katalis inovasi regional yang dapat memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kualitatif ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas UMKM memerlukan pendekatan holistik dan ekosistemik, bukan sekadar intervensi ekonomi semata. Dukungan regulasi harus diiringi dengan investasi infrastruktur, perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi digital, serta sinergi antaraktor pembangunan daerah. Dengan demikian, UMKM dapat bertransformasi dari pelaku ekonomi tradisional menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan inklusivitas. Hasil ini sejalan dengan literatur terkini (Alonso & Kok, 2023; OECD, 2024) yang menekankan pentingnya membangun ekosistem UMKM yang berorientasi pada kolaborasi, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap transformasi digital global.

Interpretasi hasil menunjukkan bahwa peran UMKM menjadi kuat ketika didukung oleh ekosistem lokal yang kondusif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan fasilitasi modal mikro, membangun pusat pelatihan kewirausahaan lokal, dan mengembangkan platform pemasaran digital lokal

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa UMKM memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap GRDP dan penyerapan tenaga kerja. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena hambatan seperti akses modal, kapasitas manajerial, dan infrastruktur. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan data panel lintas kabupaten/kota untuk generalisasi temuan serta mengeksplorasi sektor-sektor spesifik.

References

Audretsch, D. B., & Thurik, A. R. (2004). *A model of the entrepreneurial economy* (No. 1204). Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy.

Glonti, V., Manvelidze, R., & Surmanidze, I. (2021). The contribution of SME to regional economic development: On example of Adjara Autonomous Republic. *European Journal of Sustainable Development*, *10*(1), 513-513.

Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., Maulidia, I., & Tambunan, A. K. (2025). Peran UMKM jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(1b), 2672-2678.

Endris, E., & Kassegn, A. (2022). The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to the sustainable development of sub-Saharan Africa and its challenges: a systematic review of evidence from Ethiopia. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *11*(1), 20.

Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *9*(2), 184-204.

Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, *1*(1), 1-17.

Sarif, R. (2023). Peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *1*(1), 68-73.

Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, *7*(2), 208-217.

Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *11*(1), 33-64.

Nanta, B. M., Tanjung, H. Y., Ritonga, M. A. P., Saragih, M. A., Tanjung, R. R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Umkm Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1).

Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa peran umkm terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, *2*(4), 53-62.

Salsabillah, W., Tarissyaa, U., Azizah, N., Fathona, T., & Raihan, M. (2023). THE ROLE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN SUPPORTING THE INDONESIAN ECONOMY. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Sciences (Ijoms)*, *2*(2), 255-263.

Ayalu, G., Abbay, A. G., & Azadi, H. (2022). The role of micro-and small-scale enterprises in enhancing sustainable community livelihood: Tigray, Ethiopia. *Environment, Development and Sustainability.*

Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic growth, increasing productivity of SMEs, and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *7*(1), 20.